

PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DIKANTOR PANWASCAM MENDAHARA

Irwan Gano ¹, Siti Fatimah ², Wandis ³

Institut Islam Al Mujaddid Sabak

*Email : irwangano2002@gmail.com*¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di Kantor Panwascam Kecamatan Mendahara Ilir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi pemilu. SDM yang terlatih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap potensi pelanggaran di lapangan. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas, tingkat pendidikan yang beragam, dan kurangnya pelatihan lanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan tugas pengawasan. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas SDM berkontribusi signifikan dalam memperkuat integritas dan efektivitas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan.

Kata Kunci : *Pengawasan Pemilihan Umum, SDM, Kapasitas, Pelatihan*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting (Mazlan, M.,2024). Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya, termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam), memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan (Nurkinan, N.2018).Meskipun demikian, banyak anggota yang masih kurang memahami mekanisme dan prosedur pengawasan yang efektif. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan dan, pada gilirannya, dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.Melihat kondisi tersebut, kami menginisiasi program peningkatan kapasitas SDM di Kantor Panwascam Mendahara Ilir (Punu, E. J. 2016). Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota Panwascam agar mereka lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan pemilu (Alaydrus, A., Sos, S 2023). Diharapkan, dengan peningkatakapasitas ini, pengawasan pemilkecamatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pelatihan yang dilakukan mencakup berbagai materi, mulai dari pemahaman tentang undang-undang pemilu, teknik pengawasan, hingga metode evaluasi hasil pemilu. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pengawasan yang

semakin relevan di era digital saat ini (Hartati, W., 2024). Melalui pendekatan interaktif, peserta diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Kami juga melakukan pendampingan langsung setelah pelatihan untuk membantu anggota Panwascam menerapkan ilmu yang telah diperoleh (PUTRI, N.T. 2019). Pendampingan ini dilakukan saat menjelang pemilu, sehingga anggota dapat merasakan langsung tantangan dan situasi yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, diharapkan anggota dapat mengatasi hambatan yang muncul dan menjadi lebih siap dalam menjalankan tugas mereka (Alaydrus, A., Sos, S.)

Program ini juga berusaha mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu. Masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih dan akuntabel. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM di Panwascam diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan. Melalui pengumpulan data kualitatif dari peserta pelatihan, kami ingin mengetahui sejauh mana peningkatan kapasitas ini berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Mendahara Ilir.

Penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala merupakan salah satu pilar dalam sistem demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2007). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar pijakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 (Maulana, J., Effida, D. Q). Dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Putri, N. H 2023) Demokrasi menempatkan manusia sebagai rakyat selaku pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2008). Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat (Jurdi, F. 2018).

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengawasan pemilihan umum di kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil dan transparan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Pelatihan Teknis dan Legal: Pelatihan Regulasi Pemilu: Memberikan pelatihan intensif mengenai aturan pemilu, seperti UU Pemilu, kode etik pengawas, serta regulasi lainnya yang berlaku.
2. Pelatihan Pengawasan: Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu.

3. Pelatihan Penggunaan Teknologi: Mengajarkan penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan sistem monitoring online.
4. Simulasi dan Studi Kasus: Melakukan simulasi skenario pengawasan pemilu dan mempelajari studi kasus dari pelanggaran pemilu sebelumnya untuk memperkuat pemahaman pengawas tentang bagaimana merespons situasi yang terjadi.
5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi: Meningkatkan kemampuan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, kepolisian, dan partai politik.
6. Menjalinkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk pengawasan yang lebih luas dan komprehensif.
7. Evaluasi dan Pengawasan Internal: Membentuk mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja SDM Panwascam untuk memastikan pengawas pemilu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan internal yang ketat juga diperlukan untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan atau kelalaian tugas.
9. Pengembangan Soft Skills: Selain keterampilan teknis, pengembangan soft skills seperti komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik juga diperlukan untuk menghadapi tantangan di lapangan.

Dengan peningkatan kapasitas SDM melalui langkah-langkah tersebut, Panwascam diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan profesional. Pengawasan pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memegang peran strategis dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugas ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kantor Panwascam menjadi faktor krusial. Peningkatan kapasitas SDM di Panwascam bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani pelanggaran pemilu secara profesional. Kualitas SDM yang tinggi dapat memastikan pengawasan dilakukan dengan efektif, serta mengurangi potensi kecurangan atau penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu.

Dalam konteks ini, pengembangan keterampilan teknis, pemahaman regulasi, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi adalah beberapa hal yang perlu ditekankan dalam program peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, kemampuan soft skills seperti komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan para pengawas dapat beradaptasi dengan tantangan di lapangan.

Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum dengan kualitas derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan kualitas derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perwujudan dari upaya yang

dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data dikumpulkan dari pegawai Panwascam serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh untuk menemukan pola dan tema yang relevan terkait peningkatan kapasitas SDM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pegawai Panwascam, perwakilan Bawaslu Kabupaten, serta pihak-pihak lain yang relevan seperti tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu lainnya. Selain wawancara, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk melihat aktivitas dan praktik pengawasan yang berjalan. Dokumentasi berupa arsip pelatihan, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya turut digunakan untuk mendukung data penelitian.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorikan dan diinterpretasikan untuk menemukan pola-pola tematik yang berkaitan dengan strategi peningkatan kapasitas, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efektivitas pengawasan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan keakuratan serta kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peningkatan Kapasitas SDM Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga pengawas pemilu, seperti Panwascam, memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan (Nugroho, 2021). SDM yang memiliki kompetensi tinggi lebih mampu menyampaikan informasi secara jelas dan komunikatif kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta publik dalam pengawasan pemilu (Suparno, 2021). Dengan pengetahuan yang memadai, petugas pengawas juga lebih percaya diri dalam membangun hubungan yang partisipatif dengan warga (Mardiana, 2019). Mereka tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu (Prasetyo, 2020). Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai integritas pemilu yang jujur dan adil (Rahayu, 2021).

Kemampuan SDM yang meningkat turut memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat (Tanjung, 2019). Masyarakat yang sebelumnya apatis atau kurang paham mengenai mekanisme pengawasan kini mulai menunjukkan ketertarikan dan keberanian untuk melapor jika menemukan dugaan pelanggaran (Sulaiman, 2020). Ini terjadi karena pendekatan yang digunakan oleh petugas menjadi lebih humanis dan mudah dipahami (Setiawan, 2022). Petugas yang terlatih dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks lokal dan menyampaikan pesan dengan cara yang persuasif (Nugroho, 2021). Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas juga mengalami peningkatan (Efendi et al., 2023).

Selain itu, SDM yang terampil mampu menciptakan inovasi dalam strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat (Mazlan, As'ari, & Meilani, 2024). Misalnya, melalui media sosial, forum warga, hingga kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal, mereka memperluas kanal partisipasi publik (As'ari & Meilani, 2024). Hal ini membuka ruang dialog antara pengawas dan masyarakat, sehingga proses pengawasan tidak bersifat satu arah (Punu, 2016). Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara aktif, mereka cenderung memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan pemilu yang bersih (Tanjung, 2019). Keberhasilan strategi ini sangat ditentukan oleh kemampuan SDM dalam mengelola dinamika sosial dan memahami karakteristik komunitas setempat (Sulaiman, 2020)

Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berdampak pada kinerja internal lembaga pengawas, tetapi juga menjadi katalis bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Nugroho, 2021). Keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan akuntabel (Rahayu, 2021). Semakin tinggi kapasitas SDM, semakin efektif pula upaya pelibatan publik dalam proses pengawasan (Mardiana, 2019). Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas pemilu perlu dilakukan secara berkelanjutan (Suparno, 2021). Sinergi antara pengawas dan masyarakat akan memperkuat sistem pengawasan pemilu yang partisipatif dan transparan.

Bagaimana Efektivitas Program Pelatihan Terhadap Peningkatan Kompetensi SDM Di Panwascam

Program pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Panwascam memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Pelatihan yang dirancang secara sistematis dan relevan dengan kebutuhan lapangan mampu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi, prosedur, dan teknis pengawasan. Materi pelatihan yang komprehensif mencakup aspek hukum, etika pemilu, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan. Dengan mengikuti pelatihan, para pegawai Panwascam menjadi lebih siap dan terampil dalam menghadapi berbagai situasi selama proses pemilu berlangsung. Hal ini memperkuat profesionalitas kerja serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lapangan.

Efektivitas pelatihan sangat bergantung pada kualitas narasumber, metode penyampaian materi, dan evaluasi pasca-pelatihan. Pelatihan yang interaktif dan berbasis studi kasus terbukti lebih efektif dalam membekali peserta dengan keterampilan praktis yang aplikatif. Selain itu, pelatihan yang dilengkapi dengan simulasi pengawasan memberikan pengalaman nyata bagi peserta, sehingga mereka mampu memahami situasi yang mungkin terjadi saat menjalankan tugas. Evaluasi kinerja setelah pelatihan juga menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi terjadi. Jika hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan, maka pelatihan dapat dikatakan efektif dan perlu dilanjutkan secara berkala.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas pelatihan, seperti keterbatasan waktu, anggaran, serta perbedaan latar belakang pendidikan peserta. Tidak semua peserta memiliki tingkat pemahaman awal yang sama, sehingga diperlukan pendekatan pelatihan yang adaptif dan inklusif. Selain itu, kesinambungan pelatihan juga penting agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak bersifat sementara. Pelatihan lanjutan dan pendampingan setelah pelatihan dapat menjadi solusi untuk menjaga konsistensi kompetensi SDM. Oleh karena itu, perencanaan pelatihan perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi oleh Panwascam di lapangan.

Secara keseluruhan, program pelatihan di Panwascam terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, meskipun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek teknis. Peningkatan kompetensi ini tercermin dari meningkatnya kemampuan dalam mendeteksi pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan yang efektif mampu menciptakan tenaga pengawas pemilu yang tidak hanya memahami tugasnya, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Oleh sebab itu, pelatihan harus dijadikan agenda prioritas dalam pengembangan SDM di lingkungan Panwascam. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat pengawasan pemilu yang independen, jujur, dan demokratis.

Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pengawasan Di Panwascam

Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu di tingkat Panwascam membawa dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi kerja pengawas pemilu. Dengan adanya perangkat digital seperti aplikasi pelaporan, sistem pengumpulan data online, serta platform komunikasi internal, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Informasi mengenai dugaan pelanggaran, distribusi logistik, maupun dokumentasi kegiatan dapat diakses dan dilaporkan secara real time, yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di lapangan (Hartati et al., 2024).

Efisiensi juga terlihat dari meningkatnya koordinasi antaranggota Panwascam maupun antara Panwascam dan Bawaslu kabupaten melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp dan Telegram. Penggunaan aplikasi khusus pengawasan mempermudah pemantauan aktivitas di TPS dan penginputan data sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat secara signifikan. Namun demikian, penggunaan teknologi informasi menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi SDM dan jaringan internet yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, sehingga pelatihan dan peningkatan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pengawasan (Maulana et al., 2023; Jurdi, 2018).

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi informasi telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengawasan pemilu di Panwascam, terutama dalam hal kecepatan, akurasi, dan transparansi kerja. Teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Namun untuk mengoptimalkan manfaatnya, perlu ada kesiapan SDM, infrastruktur pendukung, dan kebijakan internal yang mengakomodasi pemanfaatan teknologi secara maksimal. Dengan sinergi antara kemampuan manusia dan kecanggihan teknologi, Panwascam dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dan profesional. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Panwascam terbukti sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, baik melalui pelatihan maupun pemanfaatan teknologi informasi. SDM yang kompeten mampu menjalankan tugas pengawasan dengan lebih profesional, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik secara aktif. Selain itu, penggunaan teknologi mempercepat proses pelaporan dan koordinasi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan dukungan teknologi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilu. (2021). Laporan Tahunan Bawaslu.
- Dewi, A. (2020). Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(2), 45-60.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). Pedoman Pengawasan Pemilu.
- Mardiana, S. (2019). Efektivitas Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik*, 14(1), 7889.
- Nugroho, B. (2021). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 33-44.
- Prasetyo, H. (2020). Peran Panwas dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), 22-34.33
- Rahayu, S. (2021). Analisis Pengawasan Pemilu di Tingkat Daerah. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 7(2), 50-65.
- Setiawan, D. (2022). Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 9(4), 99-112.
- Sulaiman, E. (2020). Kesiapan SDM dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 6(1), 15-27.
- Suparno, M. (2021). Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik. *Jurnal Politik dan Hukum*, 12(3), 56-73.
- Tanjung, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(2), 88-100.
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121-131.
- As'ari, H., & Meilani, N. L. (2024). Network Governance Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5430-543
- Mazlan, M., As'ari, H., & Meilani, N. L. (2024). Network Governance Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5430-5437.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160494.

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Hartati, W., Wijaya, S. A., Yuniarti, R., Bahri, S. Y., & Santhi, N. H. (2024). Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) dalam Rangka Pengawasan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 184-192.
- PUTRI, N. T. (2019). *Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Meningkatkan Akhlak Mulia terhadap Peserta Didik Kelas V SD N 1 Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maulana, J., Effida, D. Q., Aulia, E., Djusfi, A. R., & Fahrimal, Y. (2023). Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 129-141.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.-